



---

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA  
DESA DI DESA PADAS, KECAMATAN KEDUNGJATI, KABUPATEN  
GROBOGAN**

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Fakkar Dafin Naufan, Dr. Dra. Kushandajani, M.S.**

***ABSTRACT***

*This research is entitled "Leadership of Village Heads in Management of Village Funds in Padas Village, Kedungjati District, Grobogan Regency". Leadership has an important role in determining the performance of public organizations to manage village funds in accordance with established government regulations. The leadership of the village head is also very important in prioritizing development programs to suit the needs of the local community.*

*This research was conducted in Padas Village because Padas Village was one of the villages that carried out disbursement later than the other villages. This study aims to find the year the cause of this is based on the concept of traditional and transactional leadership of the village head. The leadership of the village head is analyzed based on the role of the village head in general which has been stated in the Law, government regulations, regent regulations concerning the management of village funds.*

*Keywords: Leadership, Village Funds, Padas Village, Role*

**1. PENDAHULUAN**

Desa mempunyai peran strategis dalam proses pembangunan di Indonesia, sebagai bentuk pemerintahan terkecil yang ada di daerah, sudah seharusnya pemerintahan desa mampu memberikan pelayanan langsung yang baik kepada masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.72 Tahun

2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa.

Undang-undang Desa yang ada memberi jaminan pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah. Anggaran tersebut disebut Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Terkait dengan penelitian ini, peneliti hanya berfokus kepada

Dana Desa, hal tersebut karena, adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menaikkan dana desa yang ada. Dana desa yang jumlahnya berbeda-beda di tiap daerah dan juga jumlah yang tidak sedikit memiliki konsekuensi bahwa dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan profesional, efisien, efektif dan juga adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat agar tidak terjadi adanya penyimpangan, korupsi dan lain sebagainya..

Dana desa merupakan salah satu dukungan untuk melaksanakan tugas dan urusan didalam Pemerintah Desa. Pemerintah telah menerbitkan PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Kemudian ada PP No.22 Tahun 2015 yaitu perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut peraturan di atas Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa diperlukan faktor-faktor pendukung antara lain sumber daya manusia (SDM), partisipasi masyarakat, budaya gotong-royong, besaran Dana Desa, serta kebijakan pemerintah. Di dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa permasalahan sumber daya manusia terkait tiga hal yakni sumberdaya aparat desa, sumberdaya masyarakat serta sumber daya pendamping desa. Dikarenakan pengelolaan dana desa adalah pengelolaan dana yang berasal dari APBN maka proses administrasi sangat rinci mulai dari proses perencanaan, mekanisme pencairan dana, pelaksanaan dan penggunaan dana, pengawasan dan pelaporan. Oleh karena itu diperlukan kompetensi sumberdaya aparat desa masyarakat dan pendamping desa yang kompeten.<sup>1</sup>

Desa memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengatur dan mengelola dana desa. Keterbatasan yang dimaksud adalah adanya kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa,

---

<sup>1</sup> Frinsa Kusuma Wardani. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan. Universitas Diponegoro

sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan. (4) Infrastruktur penunjang operasional administrasi pemerintah desa yang kurang, sehingga mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, hal tersebut juga berpotensi menurunkan motivasi aparatur dalam pencapaian tugas dan pekerjaan sehingga menghambat tercapainya sebuah tujuan.<sup>2</sup>

Berdasarkan analisis data realisasi pencairan dana desa tahun 2015 dan 2016 yang dilakukan Desa Padas kerap terlambat dalam melakukan pencairan dana desa. Hal ini dikarenakan kurangnya kepala desa tidak mampu memnuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana desa di tahap berikutnya. Syarat sarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut

- a. Menyampaiakn laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.
- b. Menyampaikan rencana penggunaan dana desa tahap yang akan diacairkan.

Dalam hal ini kepala Desa Padas belum mampu memimpin aparatur desa untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana desa sehingga mengalami keterlambatan.

Keterlambatan yang terjadi adalah dikarenakan kepala Desa Padas tidak paham secara rinci mengenai mekanisme yang berlakuseperti halnya yang disampaikan oleh Arief Efendy Zarkasi kepala selaku kepala seksi pembangunan desa.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menelaah “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa” adalah menggunakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Suryanto & Sutinah , metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>3</sup>

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk

---

<sup>2</sup> Menurut Wasistiono dan Tahir dalam Thomas, 2013

<sup>3</sup> Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 6

mengetahui tantangan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa, baik perilaku, motivasi maupun hal lainnya.

Model desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.<sup>4</sup>

Fokus penelitian ini adalah mengenai kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan dana desa, sedangkan lokus penelitian yakni di Desa Padas, Kecamatan Kedungjati, alasan penelitian ini berlokasi di tempat tersebut karena dalam laporan realisasi pencairan dana desa pada tahun anggaran 2015 dan 2016 ada beberapa desa yang terlambat dalam melakukan pencairan dana desa pada setiap tahapnya sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015, Nomor 7 tahun 2016 dan nomor 10 tahun 2016. Dan Desa Padas merupakan desa yang paling sering banyak terlambat dibanding desa-desa yang lainnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan pada wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan dan hasil observasi dalam penelitian tentang kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Padas, maka menjawab rumusan masalah yang diajukan penulis serta dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya,

Peran kepala desa dalam memfasilitasi pelayanan publik bagi masyarakat desa dengan dana desa adalah dengan menetapkan untuk apa saja dana desa digunakan. Di Desa Padas penggunaan dana desa kebanyakan masih digunakan untuk membangun infrastruktur desa baik jalan, jembatan maupun gorong-gorong. Hal ini memang tidak menyalahi Peraturan Bupati No 6 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa akan tetapi tidak menjalankan prioritas penggunaan dana desa secara keseluruhan. Seharusnya dana desa digunakan juga untuk pemberdayaan masyarakat yang juga menjadi prioritas.

Motivasi atau dorongan kerja dalam setiap organisasi sangat penting, terutama motivasi dari seorang kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut pernyataan kepala desa padas (Kasmin, 42 tahun) dalam mendorong prakarsa, gerakan

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat. 1993. Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal 89

dan partisipasi masyarakat kepala desa menekankan kepada warga di berbagai kesempatan untuk selalu semangat dalam gotong royong sehingga apa yang jadi keinginan masyarakat dapat terwujud. Akan tetapi hal ini masih terdapat beberapa kekurangan dalam partisipasi diantaranya adalah TPK pada tahun 2018 tidak di sahkan berdasarkan musyawarah dan ditetapkan secara sepihak oleh kepala desa sendiri. Hal ini berdampak kurangnya partisipasi dari anggota TPK tersebut. Kepala desa juga mengaku bahwa pengelolaan dana desa setelah uang cair banyak yang dikelola sendiri oleh kepala desa yang berkaitan tanpa melibatkan TPK.

Perumusan rancangan peraturan desa di Desa Padas tentang APBDesa yang berkaitan dengan Dana Desa dilakukan dengan musyawarah. Diawali dengan Musyawarah Dusun kemudian dari semua dusun aspirasi masyarakat dijadikan satu dan kemudian dibahas di Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan dibuat prioritas pembangunan dan disesuaikan dengan RPJMDes yang berlaku. Dalam hal ini Kepala Desa Padas (Kasmin, 42 tahun) telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada perangkat desa (Jayus, 35 tahun) bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan

program ini yaitu dilaksanakan melalui rapat desa antar pemerintah dan aparat. Selain itu kepala desa dalam hal ini melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga melalui obrolan-obrolannya dengan warga. Selain itu juga disosialisasikan melalui papan pengumuman yang ada di desa. Dalam papan tersebut diinformasikan grafis rincian penggunaan dana desa. Untuk tahun 2018 papan informasi melalui papan tersebut tidak dilakukan.

Mengenai kritik tersebut di Desa Padas sendiri iklim kritik tidak terlalu baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa (Sutarno, 45 tahun) kritik biasanya hanya datang dari kepala desa sebelumnya yang telah tidak bertugas. Kritik yang disampaikan antara lain adalah permasalahan pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan rencana yang terpampang pada papan penggunaan dana desa. Akan tetapi sangat disayangkan kritik ini tidak diindahkan oleh Kepala Desa Padas. Kepala Desa Padas tidak memberi komptar apapun terhadap kritik yang disampaikan melalui perangkat desa sehingga hingga saat ini tidak terdapat perubahan tindakan mengenai kritik tersebut.

Kepala Desa Padas (Kasmin 42 tahun) mengaku bahwa kerjasama yang dilakukan berlangsung dengan baik-baik saja tidak terkendala apapun. Kepala desa merasa selama ini yang dilakukan sudah

sangat baik dalam rangka membangun kerjasama, koordinasi dan kolaborasi dengan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Kepala Desa megaku menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan semua yang terlibat sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal pengelolaan dana desa tersebut. Berbeda dengan pernyataan perangkat desa (Sutarno, 45 tahun) bahwa kepala desa dalam hal pengelolaan dana desa cenderung tidak pernah menjalin komunikasi dengan perangkat kecuali ketika pengurusan administrasi saat pencairan dan pembuatan SPJ.

Dalam hal ini kepala desa memprioritaskan untuk ekonomi warga desa. Karena menurut kepala desa (Kasmin, 42 tahun) jika ekonomi yang diutamakan maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karena itu fokus pembangunan yang dilakukan dengan dana desa adalah dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat membantu memperlancar kegiatan ekonomi warga seperti kegiatan jual beli ke kecamatan ataupun ke desa lain dengan begitu hasil pertanian warga dapat lancar dipasarkan.

Kepala Desa (Kasmin, 42 tahun) menjelaskan bahwa TPK dibuat berdasarkan musyawarah dengan warga desa sesuai yang diatur dalam Perbub No. 7 tahun 2018 Di dalam aturan perbut tersebut

telah diatur bahwa TPK diambil berdasarkan unsur masyarakat setempat dan ahli dibidangnya. Cara pemilihannya seharusnya adalah dengan rapat dengan kepala dusun RT dan RW serta tokoh masyarakat yang kemudian dari rapat tersebut disepakati nama-nama yang akan ditunjuk untuk menjadi TPK. Memang dalam hal ini tenaga kerja yang digunakan berasal dari desa sendiri akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketidaktransparan kepala desa dalam merekrut tenaga kerja tersebut sehingga sedikit banyak menimbulkan kecurigaan pada warga. Begitu juga dengan pengadaan bahan material yang juga tidak transparan.

Menurut keterangan dari Kepala Desa Padas (42 tahun) bahwa dalam hal mempersiapkan dokumentasi kepala desa mengumpulkan perangkat desa untuk diarahkan terkait dokumen administrasi dana desa. Namun jika ditinjau pekerjaan tersebut ke perangkat desa maka didapati bahwa memang betul pada saat awal pencairan dana desa kepala desa berkomunikasi ke perangkat untuk pencairan dana desa akan tetapi dalam hal pengelolaan kepala desa mengurus sendiri anggarannya.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sangat dipengaruhi oleh tingkat intelektual masyarakat salah satu warga (Sulityowati, 35 tahun) ada yang mengaggap bahwa pemerintah sudah baik

dalam menjalankan tugasnya karena terbukti dengan gangguan infrastruktur yang cukup signifikan. Akan tetapi beda dengan masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih tentang pemerintahan dan tau mengenai dana desa maka jawabannya pun berbeda. Seperti contoh ketika diwawancarai kepala desa (Sunardi) sebelumnya menganggap bahwa hasil kinerja pemerintahan kurang memuaskan karena beberapa hal. Pertama, Penggunaan dana desa terlalu fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja tanpa adanya kegiatan-kegiatan sosial yang malah sebelum ada dana desa dilakukan seperti PKK dan lain-lain.

Kepala Desa Padas (Kasmin 42 tahun) telah melaksanakan peranannya sebagai administrator pembangunan yang salah satunya yaitu pemberian motivasi kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi di dalam membangun desanya. Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Padas kepada masyarakatnya ialah berupa motivasi secara sosial, fisiologis maupun motivasi pemberian semangat dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa.

Bimbingan yang dilakukan Kepala Desa Padas berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan perangkat desa (Siswolo) bahwa kepala desa jarang sekali melakukan bimbingan terhadap perangkat dan cenderung ahanya menyerahkan tugas administrasi langsung kepada perangkat.

Hal ini juga sudah dikonfirmasi langsung ke kepala desa bahwa sanya memang dalam hal administrasi kepala desa hanya menyerahkan langsung ke perangkat. Komunikasi nya pun juga terbatas antara perangkat dan kepala desa hal ini juga lah yang menyebabkan.

Kepala Desa Padas selaku pemimpin dalam pemerintahan Desa Padas yang bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan desa. Menurut beberapa perangkat desa yang diwawancarai Komunikasi yang Pemerintah Desa Padas terlihat menjadi kurang baik antara kepala desa dan perangkatnya, tidak heran jika pemerintahan Desa Padas tersebut menjadi kurang berkembang lagi dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan wawancara dengan salahsatu warga beberapa (Mukmin 52 tahun) berpendapat bahwa dana desa Padas seharusnya bisa dialokasikan untuk hal lain selain daripada pembangunan infrastruktur. Kepala Desa memang sudah menajlankan mekanisme yang berlaku seperti halnya musyawarah awal tahun. Akan tetapi di dalam musyarah tersebut juga ada beberapa usulan dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menggunakan dana desa selain untuk infrastruktur akan tetapi kenyataannya hal itu belum bisa terealisasikan. Karena mayoritas orang yang terlibat dalam

pengambilan keputusan tersebut ingin memfokuskan dalam infrastruktur.

Dengan adanya dana desa seharusnya menjadikan mempermudah kepala desa dalam hal pengembangan potensi desa. Akan tetapi yang terjadi di desa padas tidak seperti itu. Kepala desa yang terlalu fokus terhadap pembangunan infrastruktur sehingga kurang memperhatikan kemampuan potensi masyarakat desa itu sendiri. Kepala desa hanya mengartikulasikan kemampuan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan sehingga dilaksanakannya kegiatan desa seperti pelatihan menjahit. Padahal jika mengikuti aturan yang ada seharusnya Kepala Desa diharuskan untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana dengan BUMDes tersebut potensi Sumberdaya Masyarakat pun juga akan tepacu menjadi lebih baik lagi.

Dari berbagai paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Padas tidak bisa memberikan motivasi terhadap perangkat dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Kepala Desa (Kasmin) mengaku bahwa memang tidak biasa dalam memberikan apresiasi dan Motivasi terhadap warga, perangkat desa maupun Tim Pelaksana Kegiatan.

## **1. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan pada wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan dan hasil observasi dalam penelitian tentang kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Padas, maka menjawab rumusan masalah yang diajukan penulis serta dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya,

Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa sangatlah banyak mulai dari pembuatan kebijakan hingga dengan penyusunan laporan kegiatan Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Padas diantaranya sebagai berikut :

- memfasilitasi pelayanan publik,
- memberikan motivasi, perumusan peraturan desa, mensosialisasikan program kerja,
- Menerima kritik dan saran,
- melakukan koordinasi dengan perangkat lain,
- menentukan program prioritas,
- membentuk tim pelaksana kegiatan,
- mempersiapkan dokumen administrasi.

Dari beberapa peran yang telah disebutkan tersebut Kepala Desa Padas masih memiliki beberapa kekurangan dalam menjalankan perannya. Beberapa kekurangan tersebut adalah kepala desa tidak pernah memeberikan motivasi terhadap perangkat desa, Sosialisasi program kegiatan juga belum dilakukan di tahun 2018, koordinasi dan kerjasama yang buruk anatar kepala desa dengan perangkat ataupun TPK.



Gaya kepemimpinan Kepala Desa dikategorikan menjadi dua yakni transformasional dan transaksional. Dalam gaya kepemimpinan transformasional dapat tarik indikator kepemimpinan diantaranya memiliki karisma, dapat memberikan motivasi yang menginspirasi, dapat mengarahkan dalam perangkat dalam memecahkan masalah, dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Kepala Desa Padas dalam kepemimpinan transformasional didapati beberapa kekurangan diantaranya masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan kinerja kepala desa, kepala desa dinilai tidak bisa memberikan motivasi dan juga tidak dapat memberikan arahan. Sedangkan di dalam kepemimpinan transaksional juga tidak beda jauh kepala desa tidak pernah memberikan apresiasi terhadap kinerja perangkat desa. Kepala desa juga tidak melakukan fungsi manajemen yang baik seperti halnya contoh tidak memfungsikan TPK sebagaimana mestinya. Selain itu dalam mendelegasikan wewenang kepala desa juga belum mampu melakukan dengan baik lantaran hanya sekedar memasrahkan urusan administrasi tanpa tau bagaimana problematika yang dihadapi.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat

membantu kepala desa khususnya Kepala Desa Padas dalam rangka pengelolaan dana desa.

1. Dari semua kesimpulan yang disampaikan diatas memang dapat ditarik bahwa peran kepemimpinan kepala desa sangatlah amat penting. Maka dalam rangka agar pengelolaan dana desa di Desa Padas khususnya bisa menjadi lebih baik maka perlu adanya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang didalamnya mengatur tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala desa sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa. Hal ini bertujuan agar meminimalisir adanya kepala desa yang kurang berkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa.

2. Dalam rangka pemilihan umum desa sekiranya panitia pengawas dapat lebih diperketat dengan menyelidiki adanya indikasi-indikasi money politic. Hal ini diperlukan karena berdasarkan wawancara beberapa warga kejadian ini masih kerap sekali terjadi yang kemudian membuat hasil pemilihan tidak lagi objektif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Ambar Teguh Sulistyani . *Kepemimpinan Profesional: Pendekatan Leadership Games*. Yogyakarta: Gaya Media. Hal. 12. 2008

Nugi Hassel S. Tangklisan . *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo. Hal. 6. 2007

- Dino Patti Djalal . Harus Bisa: Seni Memimpin Ala SBY. Eka Tjipta Foundation: Jakarta. 2007
- J. Kaloh. *Kepemimpinan Kepala Daerah. (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Melayu S.P. Hasibuan. Manajemen, dasar, pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- T. Hani Handoko. Edisi kedua. Jakarta: Gunung Agung. 1984
- Ambar, Teguh Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : Graha Ilmu). 2009.
- Samodra Wibawa. "Kepemimpinan untuk Masyarakat Sipil," JKAP, I (mei 1996), hal 60-73
- Gibson, Vancevich, Donell, 1998. Organisasi dan Manajemen, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta.
- Ranupandojo, H., dan Suad Husnan, 2002, Manajemen Personalialia, Yogyakarta: BPFE.
- Miftah Thoha. 2003, Kepemimpinan Dalam Manajemen Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pawar, B.S. and Eastman, K.K. (1997). The nature and implications of contextual influences on transformational leadership: a conceptual examination. *Academy of Management Review*, 22 (1), 80-109.
- Robbins, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Bass, B.M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: The Free Press
- Stone, Raymond J. (2005). *Human Resources Management*; . Fifth Edition. Australia, Willey.
- Amarjit Gill, Nahum Biger, Neil Mathur. (2010). *The Relationship Between Working Capital Management And Profitability*. *Business and Economics Journal*. Vol BEJ-10.
- Suryanto, Bagong, Sutinah. 2007. *Meotde Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Media Group. Hal. 166
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 6
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal 89
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

### **Jurnal**

- Frinsa Kusuma Wardani. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan*. Universitas Diponegoro
- Firly Nur Agustini. *Buletin APBN Edisi 24 Vol II. Pentingnya Kompetensi Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. 2017
- Abidin, Zainul. *Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Kementerian Keuangan. 2015
- Riyani Nunuk. *Analisis Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Muhammadiyah Suakarta. 2016

Thomas. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*, eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1. 2013

Ambar Teguh Sulistyani . *Kepemimpinan Profesional: Pendekatan Leadership Games*. Yogyakarta: Gaya Media . 2008

Giman . *Kepemimpinan Agus Fachtur Rahman dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik. FISIPOL. UGM. 2014

Gani. Abd. Yuli Andi & Tjahjanulin Domai. 2012. Modul 1 Matakuliag Kepemimpinan Sektor Publik, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Diakses dari [yahjanulindomai.lectures.ub.ac.id/files/.../Modul-1/doc](http://yahjanulindomai.lectures.ub.ac.id/files/.../Modul-1/doc), tanggal 15 April 2018